



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Studi Kasus Di: Pemerintah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri

Muhammad Ardianto Lelono Putro^{1*}, Susilaningtyas Budiana Kurniawati², Supartini³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Korespondensi penulis: muhammad.ardianto98@email.com

Abstract. *This research is motivated by the persistently low performance accountability of government agencies at the sub-district level in Indonesia, including in Wonogiri Regency, despite the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) over the past several years. The low level of SAKIP implementation at the sub-district level is often caused by various internal organizational constraints that have not been identified in depth. This study aims to analyze the factors influencing the 2024 implementation of SAKIP at the Jatiroto Sub-District Office, Wonogiri Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collection techniques including participant observation, in-depth interviews with key informants, and documentation studies of SAKIP reports and Internal Government Auditor (APIP) evaluations. Data analysis was conducted thematically using NVivo 12 software, generating hierarchy charts, word clouds, and project maps to map finding patterns. The results indicate that SAKIP implementation in Jatiroto Sub-District is significantly influenced by four main factors: leadership commitment and guidance, the utilization of infrastructure and information technology, the competence and capacity of human resources, and an organizational culture that remains bureaucratic. These findings imply that the success of SAKIP depends not only on technical aspects but is also heavily determined by leadership and work culture factors. Therefore, future improvement efforts should focus on following up on APIP recommendations, formulating realistic performance achievement strategies, enhancing HR quality through continuous training, and conducting routine evaluations. This research is expected to provide practical input for other sub-district governments in strengthening SAKIP implementation to achieve more accountable and effective governance.*

Keywords: Accountability; Government Agency Performance; SAKIP.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat kecamatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonogiri, meskipun pemerintah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak beberapa tahun terakhir. Rendahnya implementasi SAKIP di tingkat kecamatan sering kali disebabkan oleh berbagai kendala internal organisasi yang belum teridentifikasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAKIP tahun 2024 di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi berupa laporan SAKIP dan evaluasi APIP. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 yang menghasilkan hierarchi chart, word cloud, dan project map untuk memetakan pola temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Kecamatan Jatiroto dipengaruhi secara signifikan oleh empat faktor utama, yaitu komitmen dan kepemimpinan pimpinan, pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi informasi, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia pegawai, serta budaya organisasi yang masih bersifat birokratis. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan SAKIP tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan dan budaya kerja. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penindaklanjutan rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), penyusunan strategi pencapaian kinerja yang realistis, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta pelaksanaan evaluasi rutin secara berkala. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan praktis bagi pemerintah kecamatan lain dalam memperkuat implementasi SAKIP demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efektif.

Kata kunci: Akuntabilitas; Kinerja Instansi Pemerintah; SAKIP.

1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana para pengambil keputusan di sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana negara serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta melaporkan kinerja instansi pemerintah, guna meningkatkan pertanggungjawaban dan kinerja secara keseluruhan. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, selaras dengan akuntabilitas keuangan negara, di mana setiap instansi wajib mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil akhir dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD secara kuantitatif dalam satu siklus anggaran tahunan, sekaligus menjadi dasar evaluasi tahunan instansi terkait.

Proses evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah menyampaikan LKjIP melalui aplikasi elektronik e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id), kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional untuk menilai tingkat implementasi dan mendorong orientasi hasil yang tepat sasaran. Secara umum, evaluasi ini bertujuan memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat pencapaiannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Penerapan SAKIP dipengaruhi oleh berbagai faktor motivasi organisasi, yang dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan, khususnya institusional isomorfisme. Mekanisme koersif, mimetik, dan normatif berperan dalam mendorong adopsi SAKIP, di mana isomorfisme mimetik dan normatif sering kali memiliki pengaruh signifikan, sementara koersif lebih bergantung pada variabel seperti koneksi politik.

Hasil evaluasi SAKIP nasional menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, nilai rata-rata SAKIP di tingkat kabupaten/kota meningkat, mencerminkan upaya berkelanjutan menuju tata kelola yang lebih akuntabel, meskipun masih terdapat variasi antar daerah. Beberapa daerah berhasil meraih predikat tinggi seperti AA, sementara Kabupaten Wonogiri mencatat performa solid dengan predikat BB dan nilai yang menunjukkan harmonisasi perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang semakin matang. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara capaian di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, skor SAKIP mencapai sekitar 76,95 pada tahun 2024, meningkat sedikit dari tahun sebelumnya tetapi masih tertinggal dari capaian kabupaten secara keseluruhan. Kesenjangan ini menggambarkan tantangan nasional yang lebih luas, yaitu implementasi SAKIP yang kuat di tingkat atas namun cenderung lemah di unit terkecil pemerintahan, sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan publik di akar rumput.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat implementasi SAKIP melalui penguatan regulasi, pembinaan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi. Selain Perpres Nomor 29 Tahun 2014 sebagai payung hukum utama, Kementerian PANRB memperbarui pedoman seperti Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang menekankan orientasi hasil dan teknologi. Upaya lain meliputi evaluasi tahunan, rapat koordinasi akselerasi (seperti yang diselenggarakan pada 21 Februari 2024 untuk daerah prioritas), bimbingan teknis, pendampingan langsung, serta pengembangan aplikasi elektronik untuk efisiensi pelaporan. Komitmen pimpinan dan harmonisasi sistem perencanaan-evaluasi menjadi kunci utama dalam mengubah mindset birokrasi dari pengeluaran anggaran semata menjadi pencapaian hasil nyata bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan penting mengenai implementasi SAKIP. Misalnya, penelitian Sofyan (2025) di Sekretariat Jenderal DPD RI menunjukkan dampak positif SAKIP terhadap perencanaan dan pelaporan kinerja, meskipun tantangan konsistensi monitoring masih ada. Setiawan dan Reviandani (2024) menemukan efektivitas E-SAKIP di DPMPTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan transparansi, tetapi terhambat oleh penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang belum merata. Demikian pula, Rahma (2023) di Aceh menegaskan peran SAKIP dalam transparansi dan pengukuran target, dengan kekurangan pada penguasaan teknis ASN dan pelatihan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya kapasitas SDM, teknologi, dan monitoring berkala sebagai elemen krusial.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada tingkat kementerian, lembaga negara, atau dinas kabupaten/kota, sehingga kurang mengeksplorasi implementasi di tingkat kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kesenjangan ini menjadi gap utama, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis unik seperti Kecamatan Jatiroto yang berupa daerah pegunungan dengan tantangan aksesibilitas infrastruktur dan sumber daya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi SAKIP di tingkat mikro tersebut, agar akuntabilitas kinerja dapat merata hingga akar rumput, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor spesifik di konteks kecamatan pedesaan, yang jarang dikaji secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAKIP tahun 2024 di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di tingkat tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan serta pemangku kepentingan lainnya. Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "accountability", yang merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok siap mempertanggungjawabkan hasil dari wewenang dan tanggung jawab yang diemban. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban secara eksplisit, tetapi juga melibatkan aspek yang dapat dihitung dan diuji secara empiris. Waluyo (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil, sementara Mardiasmo (2018) menekankan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan yang transparan kepada pemberi amanah.

Konsep ini semakin berkembang dalam era reformasi birokrasi Indonesia, di mana akuntabilitas bergeser dari pendekatan prosedural semata menuju orientasi hasil (outcome-oriented), sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2006) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak boleh terbatas pada input dan output, melainkan harus mencakup outcome berupa dampak nyata bagi masyarakat. Pergeseran paradigma ini krusial agar akuntabilitas tidak menjadi formalitas administratif, melainkan mekanisme pengendalian efektif terhadap birokrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun kepercayaan publik. Mahmudi (2016) menegaskan perlunya transisi ke akuntabilitas berorientasi hasil yang substantif, sementara Sedarmayanti (2012) memposisikan akuntabilitas sebagai pilar utama good governance, yang didasarkan pada standar moral, etika, dan legalitas tinggi, bukan sekadar kepatuhan hukum atau keuangan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis, penganggaran efisien, dan pelaporan transparan, memastikan sumber daya negara digunakan secara efektif untuk pencapaian tujuan publik.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di tingkat instansi pemerintah, Indonesia menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kerangka operasional utama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah, guna mendukung pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Sistem ini mengintegrasikan siklus manajemen kinerja secara holistik, meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Pendekatan ini menekankan orientasi pada hasil yang tepat sasaran, sehingga instansi tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga pencapaian dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja melalui implementasi SAKIP, dengan evaluasi AKIP sebagai proses analisis sistematis untuk menilai tingkat implementasi, mengidentifikasi masalah, serta memberikan solusi perbaikan. Evaluasi ini

bertujuan memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran peningkatan, serta memantau tindak lanjut rekomendasi sebelumnya. Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengadaptasi kerangka nasional tersebut, dengan penekanan pada motivasi peningkatan kinerja berorientasi hasil melalui evaluasi periodik yang mempertimbangkan kebutuhan stakeholder dan kendala operasional.

Implementasi SAKIP tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasional dan institusional. Teori kelembagaan (institutional theory), khususnya konsep isomorfisme institusional, memberikan landasan kuat untuk memahami dinamika adopsi dan implementasi SAKIP di berbagai tingkatan pemerintahan. Isomorfisme koersif muncul dari tekanan regulasi dan kebijakan pusat, mimetik dari peniruan praktik terbaik daerah lain, serta normatif dari standar profesionalisme dan pelatihan ASN. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme ini berperan signifikan dalam mendorong implementasi SAKIP, meskipun sering kali dominasi koersif di tingkat daerah menyebabkan adopsi yang lebih formal daripada substantif. Beberapa studi relevan memperkuat landasan ini: Sofyan (2025) menemukan bahwa SAKIP efektif meningkatkan perencanaan dan pelaporan kinerja di lembaga negara, tetapi tantangan konsistensi monitoring tetap ada. Setiawan dan Reviandani (2024) menyoroti efektivitas E-SAKIP di tingkat dinas kota dalam meningkatkan transparansi, meskipun terhambat oleh penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang belum merata. Rahma (2023) di Aceh menegaskan peran SAKIP dalam transparansi dan pengukuran target, dengan kekurangan pada kompetensi teknis ASN dan pelatihan. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa faktor pendukung seperti komitmen pimpinan, kompetensi SDM, sarana prasarana, serta budaya organisasi menjadi penentu keberhasilan implementasi SAKIP, sementara hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM sering muncul di tingkat lokal, termasuk kecamatan.

Penelitian ini memperoleh landasan kuat dari teori akuntabilitas berorientasi hasil dan kerangka SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja holistik, yang dikombinasikan dengan perspektif institusional untuk menjelaskan variasi implementasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kajian ini memberikan acuan teoritis bagi analisis faktor-

faktor yang memengaruhi implementasi SAKIP di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, serta upaya perbaikan yang relevan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja hingga unit pemerintahan terdepan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui strategi studi kasus tunggal. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan apa adanya dalam konteks alami, tanpa manipulasi variabel, sehingga mampu menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terkait faktor pendukung serta penghambat implementasi SAKIP di tingkat kecamatan (Sugiyono, 2022; Moleong, (2021).

Lokasi penelitian berada di Kantor Pemerintah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 76,95, yang mengalami peningkatan 0,5 poin dari tahun sebelumnya tetapi masih tertinggal 0,74 poin dari nilai kabupaten (77,69). Kesenjangan ini merepresentasikan tantangan umum implementasi SAKIP di unit pemerintahan terkecil. Secara geografis, kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan dengan aksesibilitas relatif sulit, luas wilayah signifikan, dan penduduk sekitar 50.000 jiwa yang tersebar di 15 desa/kelurahan, sehingga memberikan konteks unik terkait hambatan infrastruktur, teknologi, dan koordinasi antarlevel.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling untuk memperoleh sumber data yang benar-benar relevan dan mendalam. Kriteria informan mencakup pegawai yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan SAKIP tahun 2024, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta pegawai kunci lainnya. Jumlah informan direncanakan 3–5 orang, dengan penambahan melalui rekomendasi informan sebelumnya hingga mencapai saturasi data.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif untuk mengamati aktivitas sehari-hari terkait pengelolaan SAKIP di lingkungan kerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi; wawancara mendalam semi-terstruktur (tidak terstruktur penuh) untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari perspektif informan, dengan rekaman

audio-visual dan catatan lapangan guna menjaga keaslian dan validitas; serta studi dokumentasi berupa dokumen resmi seperti laporan SAKIP, LKjIP, evaluasi APIP, perjanjian kinerja, dan dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat dan melengkapi temuan dari observasi serta wawancara. Data sekunder meliputi regulasi terkait SAKIP dan laporan evaluasi nasional/daerah.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga alur saling terkait secara simultan: data condensation (reduksi data melalui seleksi, fokus, dan simplifikasi), data display (penyajian data dalam bentuk matriks, narasi, diagram, hierarchy chart, word cloud, serta project map), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan serta verifikasi secara iteratif). Proses reduksi data dilakukan dengan coding tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumen. Data kemudian ditampilkan dalam berbagai format visual untuk memudahkan interpretasi dan refleksi analitik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan iteratif, dengan terus merujuk kembali ke data lapangan hingga mencapai saturasi dan konsistensi temuan. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan, diterapkan triangulasi sumber (berbagai informan), metode (observasi, wawancara, dokumentasi), serta teori (perbandingan dengan konsep akuntabilitas dan SAKIP dari literatur).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selama periode Januari hingga Desember 2024 (fokus pengumpulan data utama pada semester kedua 2024 pasca-evaluasi SAKIP). Proses pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan SAKIP, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 4 informan kunci (Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Staf Perencanaan), serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti LKjIP, Perjanjian Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi AKIP (LHE AKIP) nomor B/634/700.1.2.7/VI/2025, dan rekomendasi APIP. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan NVivo 12, dengan triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan keabsahan temuan.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Jatiroto mengikuti siklus manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Perencanaan dimulai akhir 2023 dengan penyusunan Renstra 2021–2026, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan 2 Januari 2024 serta direvisi 15 Agustus 2024. Cascading IKU hingga tingkat individu berjalan sistematis, selaras dengan visi "Mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik" dan sasaran peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan bulanan/triwulanan melalui e-SAKIP dan SIPD, dengan capaian indikator melebihi target, seperti nilai kematangan organisasi 169,57%, jumlah inovasi 200%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 106,93%, dan serapan anggaran 83% dari pagu Rp4.763.268.452. Pelaporan akhir tahun melalui LKjIP dan LAKIP disampaikan tepat waktu, dengan kualitas yang semakin baik karena memuat analisis faktor pendukung-penghambat. Namun, evaluasi internal masih lemah, hanya triwulanan atau menjelang evaluasi eksternal, sehingga tidak memberikan perbaikan signifikan selama tahun berjalan—konsisten dengan temuan nasional bahwa sekitar 60% instansi daerah belum optimal dalam evaluasi internal reguler (KemenPANRB, 2023–2024).

Berdasarkan LHE AKIP tahun 2025 (atas kinerja 2024) dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatiroto memperoleh nilai SAKIP 76,95 dengan predikat BB (Sangat Baik), meningkat 0,50 poin dari 76,45 tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata nasional kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 64,23 (KemenPANRB, 2024), mencerminkan harmonisasi perencanaan-penganggaran-pelaporan yang matang, meskipun masih tertinggal 0,74 poin dari nilai kabupaten (77,69). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 94,61 (kategori baik), menunjukkan manajemen kinerja andal dan berbasis teknologi. Dokumen pendukung meliputi Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, serta SOP terkait pengukuran, monitoring, dan pelaporan. Proses didukung e-SAKIP sebagai sistem terpadu Kabupaten Wonogiri.

A. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAKIP

Analisis wawancara dan NVivo mengidentifikasi empat faktor utama: komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, budaya organisasi, serta sarana prasarana dan teknologi informasi. Komitmen pimpinan (Camat) dominan sebagai ultimate responsible, terlihat dari keterlibatan langsung dalam penetapan dokumen, pengawasan triwulanan, dan arahan fokus outcome. Semua informan menekankan dukungan struktural Camat melalui rapat rutin, bimbingan, dan respons cepat terhadap rekomendasi evaluasi. Kompetensi

pegawai memadai di level perencanaan berkat pelatihan rutin Pemkab Wonogiri, meskipun jumlah SDM terbatas dan pemahaman belum merata hingga kelurahan. Budaya organisasi mendukung melalui reward (piagam apresiasi) dan punishment berupa pembinaan/action plan, bukan sanksi keras, menciptakan motivasi perbaikan. Sarana prasarana memadai (laptop, komputer, printer), tetapi teknologi informasi (e-SAKIP) menjadi penghambat karena kendala teknis seperti error, loading lambat, kurang integrasi dengan SIPD, dan fitur belum akomodatif IKI manual.

Hasil NVivo memperkuat temuan ini. Hierarchy Chart menunjukkan komitmen pimpinan memiliki bobot terbesar, diikuti sarpras dan teknologi, kompetensi pegawai, serta budaya organisasi—mengindikasikan ketergantungan tinggi pada kepemimpinan untuk mengatasi keterbatasan operasional. Word Cloud menonjolkan kata "kinerja", "aplikasi", "target", dan "evaluasi" sebagai frekuensi tinggi, mencerminkan fokus pada pencapaian hasil dan tantangan teknologi. Project Map memvisualisasikan hubungan antar-subtema, dengan komitmen pimpinan sebagai pusat yang menghubungkan elemen lain untuk efektivitas implementasi.

Temuan faktor-faktor ini selaras dengan teori akuntabilitas berorientasi hasil (Bastian, 2006; Mahmudi, 2016), di mana komitmen pimpinan menjadi jembatan perencanaan-outcome, dan kompetensi pegawai mendukung pengukuran empiris (Waluyo, 2007). Budaya organisasi melalui reward/pembinaan memperkuat good governance moral (Sedarmayanti, 2012), sementara sarpras/teknologi mendukung transparansi (Mardiasmo, 2018; Halim, 2007). Integrasi dengan teori institusional isomorfisme (Pertiwi, 2022) menjelaskan dominasi normatif (komitmen pimpinan) dan koersif (evaluasi APIP), dengan mimetik terlihat pada peniruan kabupaten. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Sofyan (2025) dan Setiawan & Reviandani (2024) menegaskan peran monitoring dan E-SAKIP, tetapi temuan ini menambahkan konteks kecamatan bahwa kendala TI lebih dominan di tingkat mikro, sementara Rahma (2023) selaras pada penguatan SDM. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian di tingkat nasional/lembaga yang mana teknologi lebih efektif sebagai faktor yang mempengaruhi SAKIP, sedangkan di Jatiroto error teknis dan SDM terbatas menjadi penghambat utama.

B. Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi APIP, penetapan strategi pencapaian kinerja, peningkatan kualitas SDM, dan evaluasi rutin. Informan sepakat menindaklanjuti LHE AKIP, seperti publikasi dokumen tepat waktu di website, evaluasi internal bulanan rutin, optimalisasi hasil pengukuran untuk strategi, dan peningkatan IPASN melalui pelatihan. Strategi mencakup penunjukan PIC SAKIP per seksi dan action plan atas ketidaktercapaian target.

Hasil analisis Nvivo Hierarchy Chart menunjukkan tindak lanjut rekomendasi APIP dan penetapan strategi memiliki bobot terbesar, diikuti peningkatan SDM dan evaluasi berkala. Word Cloud menonjolkan "kinerja", "aplikasi", "target", dan "evaluasi" sebagai prioritas perbaikan. Project Map menggambarkan hubungan antar-subtema, dengan evaluasi berkala sebagai fondasi untuk strategi dan peningkatan SDM, serta tindak lanjut APIP sebagai penutup celah.

Upaya ini selaras dengan reformasi laporan untuk transparansi (Halim, 2007) dan evaluasi berkelanjutan (Mahmudi, 2016), dengan tindak lanjut APIP sebagai mekanisme koersif (Pertiwi, 2022). Peningkatan SDM dan evaluasi rutin mendukung outcome-oriented (Bastian, 2006). Kesesuaian dengan Sofyan (2025) pada konsistensi monitoring dan Setiawan & Reviandani (2024) pada optimalisasi E-SAKIP, tetapi temuan memperkaya dengan rekomendasi PIC dan action plan di tingkat kecamatan. Penelitian ini juga memperkaya teori isomorfisme dengan bukti adaptasi lokal di unit terkecil seperti kecamatan. Penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi bulanan, pelatihan merata, integrasi SIPD-e-SAKIP, dan publikasi tepat waktu untuk meningkatkan nilai SAKIP dan pelayanan publik tingkat kecamatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2024 berhasil mencapai nilai 76,95 dengan predikat BB (Sangat Baik), yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam integrasi perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal, meskipun masih tertinggal sedikit dari capaian kabupaten (77,69). Faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut adalah komitmen pimpinan sebagai elemen dominan yang menjadi penggerak utama melalui pengawasan langsung, arahan berorientasi outcome, serta respons cepat terhadap evaluasi, diikuti oleh sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi (terutama aplikasi e-SAKIP),

kompetensi pegawai melalui pemahaman regulasi dan pelatihan rutin, serta budaya organisasi yang mendukung dengan sistem reward non-finansial seperti piagam apresiasi dan pembinaan berbasis action plan atas ketidaktercapaian target. Kendala seperti keterbatasan jumlah SDM, error teknis pada aplikasi pendukung, serta pemahaman yang belum merata hingga tingkat kelurahan menjadi penghambat utama yang menyebabkan gap implementasi dibandingkan tingkat kabupaten, meskipun secara keseluruhan proses SAKIP telah berjalan sistematis dan selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SAKIP di tingkat kecamatan sangat bergantung pada keseimbangan antara kepemimpinan internal yang kuat dan dukungan operasional eksternal, dengan capaian indikator seperti nilai kematangan organisasi 169,57%, jumlah inovasi 200%, serta Indeks Kepuasan Masyarakat 106,93% membuktikan orientasi hasil yang semakin terwujud, walaupun evaluasi internal masih perlu diperkuat agar tidak hanya reaktif menjelang evaluasi eksternal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bagi Pemerintah Kecamatan Jatiroto untuk segera memprioritaskan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri, termasuk pelaksanaan evaluasi internal secara rutin bulanan, optimalisasi publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu melalui website resmi, serta penguatan integrasi e-SAKIP dengan SIPD guna mengurangi kendala teknis. Selain itu, tingkatkan kompetensi dan pemahaman SDM secara kolektif melalui pelatihan tahunan yang melibatkan seluruh pegawai hingga ke kelurahan, penunjukan Person in Charge (PIC) SAKIP di setiap seksi untuk tanggung jawab bersama, serta pengembangan budaya organisasi dengan memperluas mekanisme reward dan action plan cepat atas target yang belum tercapai, khususnya Indeks Profesionalisme ASN (IPASN) agar mencapai 100% di periode berikutnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, diharapkan memberikan dukungan lebih intensif berupa penambahan alokasi SDM ke kecamatan dengan karakteristik pegunungan seperti Jatiroto, fasilitasi pelatihan terintegrasi, serta monitoring keseragaman implementasi SAKIP antar-kecamatan untuk mengurangi gap antara tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lanjutan dengan pendekatan mixed methods atau kuantitatif untuk menguji generalisabilitas temuan di kecamatan lain dengan variasi geografis berbeda, serta mengeksplorasi variabel tambahan seperti

pengaruh isomorfisme eksternal lebih mendalam atau analisis komparatif longitudinal multi-tahun guna memperkaya literatur akuntabilitas kinerja sektor publik di tingkat mikro.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dengan hati-hati. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal di satu kecamatan membuat temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke kecamatan atau daerah lain di Indonesia, terutama yang memiliki konteks geografis, demografis, atau infrastruktur berbeda. Data bergantung pada wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari sejumlah informan kunci terbatas (Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, serta Staf Perencanaan), yang meskipun telah ditriangulasi, tetap berpotensi terpengaruh bias subjektif perspektif internal. Fokus pada tahun 2024 dan konteks spesifik wilayah pegunungan dengan tantangan aksesibilitas juga membatasi representasi terhadap kecamatan perkotaan atau dataran rendah, serta tidak mencakup analisis tren longitudinal multi-tahun. Selain itu, ketergantungan pada dokumen internal dan perspektif organisasi tanpa masukan eksternal langsung dari masyarakat atau evaluator pusat dapat membatasi kedalaman pemahaman dampak pelayanan publik. Keterbatasan ini menegaskan perlunya penelitian lanjutan yang lebih luas dan komparatif untuk memperkuat validitas temuan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani (2024). Efektivitas Pelatihan Aparatur Sipil Negara terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Kaimana. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), 152-165. <https://doi.org/10.70214/4sgk0p11>.
- Atmaja, I. A. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024. *Public Administration Journal (PAJ)*, 8(2), 59-69.
- Ballu, D. Z. A. (2025). *Efektivitas E-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumba Tengah*. Skripsi. Institut Pemerintah Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Sumedang.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Devi, S. M., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie). *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 341-352. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>.
- Deviani, N. A., Novaria, R., & Widiyanto, M. K. (2022). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance: Studi

- pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(4), 154-159.
- Gultom, C. R. R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2022). Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan SAKIP sebagai Upaya Penerapan Good Governance pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 25-43.
- Halid, N. N., Niswatin, & Badu, R. S. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Government Governance. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1211-1223.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kecamatan Jatiroto. (2025). *Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi*. Diambil dari : <https://kec.jatiroto.wonogirikab.go.id/?p=2068>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Kementerian PANRB perkenalkan wajah baru e-SAKIP Reviu*. Diambil dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-perkenalkan-wajah-baru-e-sakip-reviu>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: Amerta Media.
- Kumparan. (2025). Isi Tuntutan Demo 25 Agustus di DPR: Hapus Tunjangan Stop Pemborosan Anggaran. Diambil dari: <https://kumparan.com/kumparannews/isi-tuntutan-demo-25-agustus-di-dpr-hapus-tunjangan-stop-pemborosan-anggaran-25j0E3PRst6/full>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Latif, H., Asri, S., & Santosa, A. (2022). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Paser. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367-1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>.
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Moderat*, 8(4), 798-808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 1-17.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, Y. (2025). Kinerja Implementasi SAKIP dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Empiris pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JI@P)*, 14(1), 1-21.
- Megapolitan. (2025). Publik Tunggu Perubahan DPR Jika Ingin Kepercayaan Naik. Diambil dari: <https://megapolitan.antaranews.com/berita/344306/publik-tunggu-perubahan-dpr-jika-ingin-kepercayaan-naik>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi 3)*. (T. R. Rohidi, Trans.). USA: Sage Publications. (Original work published 2014)
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Monalisa, A. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(4), 1173–1180. <https://doi.org/10.26618/kimap.v3i4.8628>.
- Mukaromah, R., & Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 3(1), 89-99.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(1), 102-111.
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pertiwi, I. F. P. (2022). *Tekanan Isomorfisme dalam Adopsi Integrated Reporting Perusahaan Publik di Indonesia*. Desertasi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Provinsi Jateng. (2025). SAKIP Wonogiri terbaik ketiga se-Jateng. Diambil dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sakip-wonogiri-terbaik-ketiga-se-jateng/>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Putri, R. H., & Rahaju, T. (2023). Implementasi SAKIP dalam Perencanaan Strategis di DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto. *Publika*, 11(3), 2173-2186.
- Qurratuaini, M. (2025). *Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahma, U. (2023). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*. Skripsi. Universitas Islam Negeri, Banda Aceh.
- Rmol. (2025). Ricuh Demo DPR Tanda Krisis Kepercayaan Publik. Diambil dari: <https://rmol.id/politik/read/2025/08/26/677577/ricuh-demo-dpr-tanda-krisis-kepercayaan-publik>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) Bagian Ketiga*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, D. A., & Reviandani, O. (2024). Efektivitas E-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 416–422. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.421>.
- Sofyan, N. F. R. (2025). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja dan Skor SAKIP di Sekretariat Jenderal DPD RI. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(2), 39–49.
- Stefan, P. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.58784/rapi.67>.
- Stephani, W., & Yonnedi, E. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Publicuho*, 7(3), 1288-1302. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491>.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi Keempat)*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2007). *Manajemen publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.